

**HAK KONSTITUSIONAL KADER PEREMPUAN PKS (PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA) KOTA MADIUN DALAM
PANDANGAN FIQIH SIYĀSAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Hukum Tata Negara (Syari'ah)**



Oleh :
ALI CANDRA KUSUMA
NIM. F12213116

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ali Candra Kusuma

NIM : F12213116

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Nopember 2017

Saya yang menyatakan,

Ali Candra Kusuma

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Tesis ini telah diuji
pada tanggal 30 Nopember 2017

Tim Penguji :

1. Dr. H. Masruhan, M.Ag
2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si
3. Dr. Hj. Anis Faridah, SH. M.Si



Surabaya, 8 Desember 2017
Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALI CANDRA KUSUMA
NIM : F12213116
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA HTN
E-mail address : masalicandra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

HAK KONSTITUSIONAL KADER PEREMPUAN PKS
(Partai Keadilan Sejahtera) KOTA MADIUN DALAM PANDANGAN
FIDIH SITĀSAH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 februari 2018

Penulis

Amich

(ALI CANDRA KUSUMA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Hak Konstitusional Kader Perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun dalam Pandangan Fiqh Siyāsah

Kata Kunci : PKS Kota Madiun, Hak Konstitusional Perempuan, Fiqh Siyāsah

Tesis ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun dalam melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dalam pandangan hukum Islam (Fiqh Siyāsah). Hal ini dikarenakan PKS merupakan salah satu partai peserta pemilu yang berasaskan Islam, sedangkan dalam Islam sendiri, perempuan mempunyai tempat dan kedudukan tersendiri yang berbeda dengan laki-laki.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun dalam menyadarkan kader perempuannya bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, juga untuk mengetahui dalil dan dasar apa saja yang dipergunakan oleh PKS dalam *me/lega/kan* para kader perempuannya menggunakan hak mereka yang sesuai dengan fiqh siyāsah dalam syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun untuk melindungi hak-hak konstitusional kader perempuan mereka yang kemudian dianalisis dengan fiqh siyāsah dalam syariat Islam sehingga diketahui apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini merupakan mereka yang mempunyai jabatan penting dalam struktur kepengurusan DPD PKS Kota Madiun.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPD PKS Kota Madiun telah berupaya melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dan telah sesuai dengan fiqh siyāsah, namun yang menjadi catatan adalah PKS Kota Madiun belum satu kata dalam pemenuhan kuota 30% perempuan. Hal ini hendaknya bukan karena sekedar untuk memenuhi regulasi pemerintah saja, namun harus berangkat dari kesadaran bahwa bahwa peraturan dan regulasi yang menyangkut hak-hak perempuan hanya bisa dibuat di parlemen, jika mereka tidak mau berperan serta aktif dalam pembuatan regulasi tersebut, maka bisa dipastikan undang-undang yang dihasilkan belum terlalu melindungi hak-hak perempuan.

pendidikan seks bagi remaja, diskriminasi dalam pembagian kerja, diskriminasi dalam pembagian upah, pernikahan sirri dan lain sebagainya.

Dalam sejarah pemilu (pemilihan umum) di Indonesia, peran serta perempuan dalam pemilu masih terbilang rendah meskipun dalam setiap pemilu terdapat peningkatan. Melalui tabel kita dapat melihat komposisi jumlah perempuan dalam parlemen dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Tahun Pemilu	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum. Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen masih tergolong rendah meskipun terdapat peningkatan disetiap pemilu. Bahkan pada pemilu terakhir tahun 2014, tingkat partisipasi perempuan lebih rendah 0,54% dari pemilu sebelumnya.

Sebagai salah satu partai politik yang berasaskan Islam, L

men yang kuat untuk menjaga semua hak dan kewajiban par

ali kader perempuan. Prinsip keadilan sebagai salah satu

mereka benar-benar diterapkan. Hal ini sesuai dengan AD/A

tentang tujuan partai yaitu terpenuhinya hak, kewajiban

politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidup

ara.

Sebagai bukti dari komitmen mereka dalam memenuhi

uannya, maka pada pemilu tahun 2004 caleg perempuan ya

i bukti dari komitmen mereka dalam mo
maka pada pemilu tahun 2004 caleg peremp

memenuhi hak-hak kader
puan yang diajukan PKS

ak kader
kan PKS

ik dan parlemen menjadi perdebatan yang panjang diantara para ulama
n dahulu hingga sekarang. Paling tidak ada dua pendapat besar diantara
a' menyikapi peran serta perempuan dalam bidang publik, khususnya
parlemen. Pendapat pertama menyatakan kaum perempuan m
takan untuk mengurus hal-hal domestik. Mereka memandang a
daksejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan Tuhan.
Pandangan ini mengemukakan bahwa Islam sebagai agama yang te
runkan oleh Allah SWT menurut keyakinan umatnya sebagai konstruksi
g kompliit dan sempurna. Segala sesuatu telah diatur secara kompl
osional, termasuk yang menyangkut posisi perempuan dalam keh
arga, masyarakat dan negara.

Pandangan ini mengemukakan bahwa Islam sebagai agama yang turun dari Allah SWT menurut keyakinan umatnya sebagai konstruksi yang kompleks dan sempurna. Segala sesuatu telah diatur secara komprehensif, termasuk yang menyangkut posisi perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

arga, masyarakat dan negara.

Sebagai makhluk tuhan mereka juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Mereka harus menjaga dan memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Tuhan memberikan laki-laki dan perempuan potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggung jawab menunaikan amanah tersebut.

Tidak sedikit teks suci Al-Quran menegaskan keharusan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam tugas-tugas pengaturan dunia ini. laki-laki dan perempuan beriman menurut Al-Quran harus bekerjasama untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-teks Al-Quran juga menegaskan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik ini. hal ini dapat dilihat pada QS. Āli ‘Imrān ayat 195, Al-Nahl ayat 97, dan Al-Taubah ayat 71. Beberapa ayat Al-Quran ini dan masih ada banyak ayat yang lain menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan.

Dalam *sīroh nabawiyah* juga tercatat betapa perempuan juga memainkan peran bersama dengan laki-laki. Khadījah, ‘Āisyah, Fāṭimah, Sukainah merupakan perempuan-perempuan cerdas yang sering terlibat diskusi-diskusi sosial politik dan bahkan sering mengkritik kebijakan-kebijakan yang mereka anggap patriarkis. Hal yang sama juga terlihat dalam peristiwa baiat (perjanjian/kontrak) untuk loyal dan setia kepada pemerintah, dimana sejumlah perempuan juga ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW.

Dari fenomena yang telah disebutkan di atas, riset ini berusaha mencoba untuk mengetahui bagaimana upaya PKS Kota Madiun memenuhi hak-hak

ilmayah barat Propinsi Jawa Timur, dengan semangat keagamaan begitu
begitu banyaknya kelompok majelis-majelis ta'lim.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
elitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya PKS Kota Madiun dalam memenuhi hak
konstitusional di Bidang politik kader perempuannya?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyāsah terhadap hak-hak konstitu
perempuan di bidang politik?

Tujuan Penelitian

ma dapat dirumuskan

1. Bagaimana upaya PKS Kota Madiun dalam memenuhi hak konstitusional di Bidang politik kader perempuannya?
2. Bagaimana pandangan fiqh siwāsah terhadap hak-hak konstitu

- Tujuan Penelitian

ial kader perempuan

hak-hak konstitusional kader perempuannya terutama di bidang poli

atan yang sama dalam pemerintahan”; Pasal 27 ayat (2) meny
tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lay
usia; Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “Setiap Warga Negara berhak dan
ta dalam pembelaan negara”; Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan kea
”; Pasal 31 ayat (1) menentukan, “Setiap Warga Negara berhak me
kan”.

Dalam kaitannya dengan perempuan, sebenarnya UUD 1945 tidak
dakan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan ha
annya sebagai warga negara. Di setiap frasa atau kalimat dalam pas
1945 tertulis “setiap warga negara” atau “setiap orang” atau “tiap-tiap
”. Hal ini menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh

dakan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Di setiap frasa atau kalimat dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945 tertulis “setiap warga negara” atau “setiap orang” atau “tiap-tiap orang”. Hal ini menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh semua warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk semua warga negara bagi laki-laki maupun perempuan⁸.

⁸Jimly Asshidique, “Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya”, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/doc.\(20 September 2016\)](http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/doc.(20%20September%202016).)).

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %”.

Penegakan hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tentu harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat negara maupun warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai peserta pemilu merupakan salah satu partai yang *concern* dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuannya. Hal ini dapat diketahui dari terbitnya buku “Memperjuangkan Masyarakat Madani Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹⁴ Ismail, “Hak Asasi Manusia Menurut perspektif Islam”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 43, No.1 (2009), 99.
¹⁵ Al-Qur’an, 4:135

Jelas dalam hadits ini, perempuan kapanpun dan dimanapun dilarang untuk menjadi pemimpin karena disifatkan oleh Rasulullah SAW dengan ketidakberuntungan.

BAB IV merupakan analisis, dalam bab ini diuraikan pandangan fiqh siyāsah terkait keterlibatan perempuan dalam politik serta berbagai pendapat ulama seputar masalah tersebut.

BAB II

A. Sejarah PKS

[illegible]

Gerakan *Usrah* ini banyak terinspirasi keberhasilan revolusi Iran dan pemikiran-pemikiran dakwah Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya memunculkan tradisi militansi dan fundamentalisme dalam kajian-kajian *usrah*. Namun, pada pertengahan tahun 80-an label *Usrah* dalam kegiatan mereka berganti dengan gerakan *tarbiyah* karena munculnya gerakan Komando Jihad yang dipimpin oleh Imron yang merupakan seorang aktivis kegiatan *Usrah*.⁴⁰

Pada tahun 1990 an, terjadi pergeseran politik pemerintahan orde baru, dimana presiden Soeharto mulai menempatkan aktivis Islam sebagai sekutu. Hal

⁴¹ M. Imdadun Rahmat, *"Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen"*, Yogyakarta: LKIS, 2008. 24.

bagi PK Sejahtera untuk memperjuangkan kaum perempuan memiliki semua kualifikasi untuk mengoptimalkan tanngai individu, anggota keluarga, masyarakat maupun warga ney dimaksudkan adalah : *bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya* PKS sendiri dalam struktur organisasinya mempunyai bidK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Visi daamat 2015-2020 adalah “ Berkhidmat untuk rakyat melalui pempuan dan ketahanan keluarga”. Sedangkan misinya adahan keluarga Indonesia, penguatan paradigma ketahanngkatan kapasitas dan penokohan kader perempuan PKS sangan kelembagaan perempuan.”⁵²

PKS sendiri dalam struktur organisasinya mempunyai bidang yang disebut BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Visi dari BPKK tahun khidmat 2015-2020 adalah “ Berkhidmat untuk rakyat melalui peningkatan peran perempuan dan ketahanan keluarga”. Sedangkan misinya adalah “penguatan ketahanan keluarga Indonesia, penguatan paradigma ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas dan penokohan kader perempuan PKS serta optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan.”⁵²

–langkah, sikap dan arah institusi dakwah. (Majelis Pertimbangan Pusat PKS, “*Memperjuangkan Masyarakat Madani Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*”, (Jakarta: tp. 2008) iv.)

[illegible]

ai yang tidak ramah terhadap perempuan adalah salah dan tidak benar

ghormati dan menghargai peran perempuan dalam berbagai bidang kehi

ini sesuai dengan syari'at Islam dimana para *ṣaḥābiyyat* pada jaman Ras

V ikut andil dalam peperangan dan bai'at.⁵⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah administratif yang menjadi bagian dari propinsi Jawa Timur. Terletak di bagian barat propinsi Jawa Timur dan

⁵³ <http://pks.id/content/pks-sangat-akomodatif-terhadap-peran-perempuan> (diakses 2 Desember 2017).

⁵⁴Wirianingsih, “membebaskan dan memuliakan perempuan”, dalam <http://pks.id/content/membebasan-dan-memuliakan-perempuan> (2 Desember 2017).

Secara geografis terletak diantara 111° - 112° Bujur Timur dan dan
ang Selatan. Batas-batas administratif Kota Madiun sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Madiun
- Sebelah Selatan : Kecamatan Geger
- Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan
- Sebelah Timur : Kecamatan Wungu

Kondisi wilayah Kota Madiun seluruhnya adalah tanah datar. Dengan
ayah 33,23 Km² atau hanya sekitar 0,072 persen dari total luas wilayah pr
a Timur, Kota Madiun terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 9 Kelu
amatan terluas adalah Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12,4

Secara geografis terletak diantara 111° - 112° Bujur Timur dan 7° - 8°

- Sebelah Utara : Kecamatan Madiun
- Sebelah Selatan : Kecamatan Geger
- Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan
- Sebelah Timur : Kecamatan Wungu

Secara administratif kota Madiun terbagi menjadi 3 kecamatan dan 27

2. Kondisi Demografis

berarti Perdagangan dan Industri. Sebagian besar penduduk Kota Madiun berstatus kerja sebagai buruh/karyawan yang jumlahnya mencapai 55,81 persen pada tahun 2015. Sedangkan yang berstatus usaha mandiri sekitar 20,26 persen dan sisanya sekitar 4,74 persen bekerja sebagai pekerja bebas pertanian maupun non pertanian.

Kesejahteraan hidup penduduk Kota Madiun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan semakin lama semakin menurun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Kota Madiun sekitar 8.480 jiwa atau sekitar 4,86 persen lebih rendah daripada tahun 2013 yang jumlahnya sekitar 8,740 jiwa. Angka kesejahteraan penduduk Kota Madiun juga dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran penduduk satu juta ke atas terbilang besar, yaitu sekitar 49,23 persen. Untuk pengeluaran perkapita dibawah lima ratus ribu rupiah sekitar 14,76 persen. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penduduk Kota Madiun sejahtera.⁵⁵

Kota Madiun merupakan daerah yang berada diperbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Budaya mataram hingga kini masih terasa sangat kental dirasakan. Hal ini dikarenakan dahulu Madiun merupakan salah satu daerah yang

Disamping pengaruh kebudayaan Mataram yang begitu kuat, di Madiun dan sekitarnya terdapat beberapa Pondok Pesantren yang sudah lama berperan penting dalam mengislamkan penduduk sekitar Madiun. Pondok Pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) yang berdiri sejak tahun 1880 M atau 1303 H. Selain PSM, di Madiun, Madiun bagian selatan dahulu juga berdiri Pondok Pesantren yang didirikan oleh Raden Mas Bagus Harun. Beliau merupakan murid dari Kyai Besar Besari pendiri Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis Ponorogo.

Disamping pengaruh kebudayaan Mataram yang begitu kuat, di Madiun dan sekitarnya terdapat beberapa Pondok Pesantren yang sudah lama berdiri dan berperan penting dalam mengislamkan penduduk sekitar Madiun. Salah satu pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Madiun. Pondok pesantren ini didirikan oleh Raden Mas Bagus Harun, seorang ulama yang berdiri sejak tahun 1880 M atau 1303 H. Selain PSM, di Madiun bagian selatan dahulu juga berdiri Pondok Pesantren lainnya yang didirikan oleh Raden Mas Bagus Harun. Beliau merupakan murid dari Kyai Besar Besari pendiri Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis Ponorogo.

arah berdirinya Madiun sebelum pemisahan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Pada abad ke 15, tepatnya hari Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Bc atau 15 Juli 1568 saat Pangeran Timur yang juga merupakan adik dari sultan Pajang Hadiwijaya (Joko Tingkir) diangkat menjadi Bupati atas kabupaten Purabaya dan Puroboyo. Sejak saat itu berakhirlah pemerintahan kyai Rekso Gati (1516-1568) dan di tangan dari kerajaan Demak. Pada tahun 1568 Pangeran Timur menyerahkan kekuasaan kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Mengetahui bahwa Madiun akan jatuh ke tangan Mataram, Mataram berusaha untuk menaklukkan Purabaya namun karena Mataram sudah mempunyai musuh yang banyak, maka Mataram terpaksa mundur. Setelah itu kemudian Mataram menggunakan siasat lain, yaitu dengan menyunting Raden Ayu Retno Dumilah untuk Sutawijaya dan kemudian diboyong ke Mataram. Dengan demikian Madiun jatuh ke tangan Mataram, dan sebagai peringatan atas penguasaan Mataram terhadap Madiun, pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 nama Purabaya diganti menjadi Madiun. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan Madiun lebih memiliki nuansa Mataram.

Kota Madiun merupakan daerah strategis karena menjadi penghubung dua provinsi, yaitu provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena yang strategis, Kota Madiun menjadi daerah Urban, dimana banyak orang dan berpindah tempat tinggal ke Kota Madiun untuk bekerja dan tas.

B. Partisipasi PKS Kota Madiun Dalam PEMILU 2014

[illegible]

Menanggapi ayat tersebut profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa memahami ayat tersebut secara khusus –konteks rumah tangga- lebih sesuai, hal ini dikarenakan lanjutan ayat ini menegaskan sebab kepemimpinan itu, yang antara lain karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya/nafkah keluarga mereka masing-masing.⁸⁶

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا بِمِرْيَةٍ

Hadith tersebut mendapatkan catatan dari beberapa ulama' terkait dengan kepemimpinan perempuan. DR. Yūsuf Al-Qordōwi menilai bahwa hadith tersebut hanya khusus ditujukan kepada penguasa Kisra yang memang perempuan.⁸⁸ Hal

⁸⁷ hadits tersebut meskipun terdapat dalam *ṣoḥiḥ* Bukhori, namun Syekh Muhammad bin sulaiman Al-Asyqor meragukan kesahihan hadits ini. Hal ini disebabkan dua hal. **Pertama** *rowi* hadits ini adalah Abi Bakroh, seorang sahabat nabi yang tertolak *syahadah* nya karena telah melakukan *qozaf* (tuduhan zina) terhadap Al-Mugiroh bin Syu'bah dan tidak bertaubat. **Kedua** riwayat hadits ini hanya *bersumber* dari Abi Bakrah saja. Menjawab keragu-raguan tersebut 'Abdul Muḥsin bin Ḥamd Al-'Abad menuliskan sebuah buku berjudul

⁸⁸ Pernyataan beliau tersebut diungkapkan dalam acara “Fiqh Al-Hayāh” yang disiarkan oleh Channel “Anā”. Dalam acara tersebut beliau menjelaskan bahwa perempuan mempunyai

يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فَلَا بَنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ

“Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu ‘Ali bin Abi Tholib) menyangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi (yaitu) si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah SAW bersabda : “Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani’”. (HR. Bukhori).¹⁰¹ Hadith ini menunjukkan bahwa perempuan juga ikut dalam melakukan politik praktis, karena Rasulullah SAW membenarkan sikap yang diambil oleh Ummu Hani’ dalam memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir. Sedangkan jaminan keamanan merupakan salah satu aspek di bidang politik.

Dalam Hadith yang lain, diceritakan bagaimana ‘Aisyah RA keluar menuju Bashrah untuk memimpin pasukan melawan ‘Ali bin Abī Tolib. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga Uthman bin Affan.¹⁰² Bukankah ini termasuk keterlibatan langsung dalam politik praktis ?. Memang setelah kejadian tersebut Aisyah menyesal, tetapi

¹⁰¹ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Al-‘Ashqolaniy, “*Fatḥ Al-Bārī*”, Vol. 10, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1380 H), 551.

¹⁰² Hadith tersebut terdapat dalam shoḥīḥ Bukhori Kitab Fitnah bab *Al-Fitnah allatī Tamūju Ka Mauj Al Bahri*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْثَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالرَّيْبُزُّ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ إِنَّهَا لَرُوحَةٌ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِبْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ

Muhammad Yūsuf Mūsā, salah seorang ulama' kontemporer, menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin negara (*Imāmah*) adalah laki-laki, sedangkan perempuan maka kepemimpinan mereka tidak sah karena kekurangan mereka dalam akal dan agama. Adapun an-Nawawī yang menyebutkan bahwa banyak pemimpin dunia perempuan, maka kepemimpinan mereka mulai jaman dahulu hingga sekarang adalah tidak sah secara umum kepada seluruh perempuan. Memang ada sebagian perempuan yang akal dan nalar lebih kuat dari laki-laki, akan tetapi tidak semua perempuan seperti itu, malah kebanyakan dari mereka lemah dalam akal dan agama.

Adapun selain pemimpin negara, peran serta perempuan

ik dan kekuasaan saat ini sangat dibutuhkan karena masih ba
mpuan yang belum terdengar oleh negara dan terwakili, h
rbolehkan oleh syariat Islam dan masuk ke dalam ranah *masl*

¹⁰⁷ Dr. Muhammad Sa'īd Romāḍōn Al-Būṭy dalam bukunya “Dowābiṭ Al-Maṣlaḥah Fi Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah” menjelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai maṣlaḥah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam jika memenuhi beberapa hal, **Pertama** perbuatan tersebut masuk

Berbagai upaya dilakukan DPD PKS Kota Madiun untuk mengingatkan dan memberitahukan kepada kader perempuannya bahwa mereka mempunyai hak-hak yang oleh konstitusi (UUD 1945) dilindungi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diantara upaya-upaya yang telah dilakukan adalah melalui sosialisasi dalam kajian rutin (*liqo*), pendekatan personal kepada kader-kader perempuannya, dan pengkaderan yang selalu dilakukan untuk melanjutkan estafet perjuangan generasi sebelumnya.

[illegible]

mpuan di Kota madiun melalui berbagai macam program
ngga mereka memiliki waawasan luas dan paham tentang
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2. DPD PKS Kota Madiun hendaknya menyatukan perseps
tara para kadernya dalam pemenuhan kuota 30% pere
lakanya bukan karena sekedar untuk memenuhi regulasi p
un diharapkan dengan terpenuhinya kuota tersebut kesenjar
dan perempuan dalam berbagai bidang semakin menipis.

tara para kadernya dalam pemenuhan kuota
laknya bukan karena sekedar untuk memenuhi
un diharapkan dengan terpenuhinya kuota terse
dan perempuan dalam berbagai bidang semakin m

Robert K. *Qualitative Research From Start to Finish*, New York: Guilford Press, 2011.

Robert K. *Qualitative Research From Start to Finish*, New York: Guilford Press, 2011.

Robert K. *Qualitative Research From Start to Finish*, New York: Guilford Press, 2011.